1994 pernah memperoleh piagam penghargaan dari Presiden Soeharto sebagai transmigran teladan.

Lalu di Kabupaten Pontianak, berhasil pula sebagai Kepala Desa. Termasuk di beberapa daerah yang tak perlu disebutkan satu persatu.

Kami selalu mengevaluasi tiap tahun, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dimana transmigran asal DKI ditempatkan.

Di Desa Rasau Jaya, Pontianak, transmigran asal DKI Jakarta bernama Suwarno berhasil dengan baik. Ia memiliki 12 buah truk, 8 motor air dan empat mesin penggilingan padi.

Di Pontianak, ada juga transmigran yang menjadi boss pemulung, bukan sebagai gembel atau gepeng.

Agak Lamban Perkembangannya

MJ : Tentang lambannya perkembangan di lokasi penampungan transmigran asal DKI pernah diutarakan beberapa pejabat daerah maupun DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimanan mengatasinya.

DHKW : Saya pikir, problem itu dialami semua daerah. Soal lambannya perkembangan bisa saja terjadi. Tapi pada umumnya, transmigran asal DKI Jakarta cukup berhasil di daerah pemukiman barunya.

Mereka memang telah dikondisikan menghadapi segala tantangan dengan segala konsekuensinya.

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi yang kami lakukan, koordinasi dengan Kanwil Deptrans daerah-daerah penerima jauh lebih baik. Hasil karyanya positif. Kalau toh ada satu dua transmigran yang kurang berhasil, rasanya memang wajar.

MJ : Program pengiriman Transmigran Swakarsa Murni (TSM) 1995 berapa Kepala Keluarga (KK) dan kemana saja sasaran yang ingin dicapai.

DHKW : Program pembinaan TSM 1995-1996 sekitar 1.900 KK dengan daerah sasaran atau tujuan ke seluruh Indonesia. Polanya ada Perkebunanan Inti Rakyat (PIR), Perkebunan, Pengembangan Desa Potensial, Pola Tanaman Pangan, jasa industri dan lain sebagainya.

Drs. Achmad Fauzi (kiri) dan PG. Hirawanto

Sedangkan untuk 1995, 302 KK ke Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalsel, Kalteng, Sulsel sampai Irian Jaya. Ini sesuai UU No.3/1975 guna meningkakatkan kesejahteraan transmigran dan peningkatan daerah transmigrasi, hingga, kedua pihak bisa memperoleh keuntungan.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah itu juga bisa berkesinambungan, baik pembangunan di atas maupun di bawah bumi.

MJ : Presentasi pengiriman TSM asal DKI Jakarta ke berbagai daerah seluruh Indonesia dari Pelita I s/d Pelita V berapa dan apakah akan ada peningkatan jumlah pengiriman TSM.

DHKW : Sesuai program pemerintah, tentu akan ada peningkatan. Namun hingga kini, untuk Pelita VI belum bisa kami jelaskan. Yang jelas, pengiriman TSM pada Pelita I tahun 1971-1973 sebanyak 916 KK, Pelita II 4.260 KK, Pelita III 4.482 KK, Pelita IV 3.896 KK dan Pelita V sampai September 1995 telah mencapai 6.587 KK.

Target program pelaksanaan TSM DKI Jakarta tahun anggaran 1995-1996 adalah 375 KK. Aceh Barat berdaya tampung 100 KK akan dikirim 40 KK. Sumatera Utara berdaya tampung 100 KK akan diisi 40 KK, Sumatera Barat dari daya tampung 204 KK akan dikirim 60 KK.

Riau (Indragiri Hulu) 165 KK hanya dikirim 50 KK, Sarko (Jambi) 100 KK hanya dikirim 25 KK, Tanjung Jabung dari 500 KK hanya dikirim 25 KK.

Sanggau (Kalbar) dari 100 KK akan dikirim 25 KK, Kota Baru (Kalsel0 310 KK hanya dikirim 25 KK dan Kutai (Kaltim) dari kebutuhan 400 KK hanya akan dikirim 50 KK.

(su)

OPINI

MENITIPKAN HARAPAN DI KOTA TUA

Oleh El Widra

Dominasi gedung-gedung pencakar langit lebih mengesankan Jakarta sebagai kota metropolitan. Padahal Jakarta berwajah budaya yang mecerminkan sejarahnya yang panjang dalam romantika zaman penjajahan, perjuangan sampai masa kemerdekaan.

DERU mesin pembangunan mengubah wajah Jakarta semakin modern. Sejumlah gedung bertingkat, plaza, hotel dan jalan layang dibangun di pusat kota dan kelak sampai di pinggiran juga. Bila ini terjadi, julukan Jakarta sebagai rimba beton, bukanlah dramatisasi keadaan belaka.

Modernisasi memang sebuah keberanian untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang lebih pas dengan keadaan. Kebutuhan manusia yang tak terbatas memerlukan sarana dan prasarana kehidupan yang lebih baik.

Jika dekade 60-an Hotel Indonesia menjadi kebanggaan ibukota, sekarang berpuluh hotel hanya kita pandang sebagai sarana akomodasi belaka. Semua hotel yang berkelas menunjukkan keindahan arsitekturnya. Mereka berkompetisi meningkatkan fasilitas yang dimiliki.

Perkantoran, pertokoan, dan perumahan berlomba menunjukkan nuansa mewah, nyaman dan indah dipandang. Stasiun Gambir yang hijau muda dan taman kota yang luas menghilangkan jejak lama (bangunan Stasiun Gambir) sebagai peninggalan sejarah.

Turis di Sunda Kelapa

Orang yang pernah menyaksikan kawasan Harmoni tempo doeloe sampai masa-masa pertama kemerdekaan, kini kehilangan gambaran bentuk bangunan bergaya kolonial dulu.

Hotel des N Indes, misalnya, bangunan hotel bergaya *art deco* itu hilang ditelan waktu. Sebagai gantinya berderet toko-toko dengan kaca tebal memantulkan wajah kekinian.

Sadarlah kita bahwa senantiasa ada yang hilang di saat berlalunya sebuah zaman. Tetapi mujurlah, bahwa tak semua peninggalan sejarah itu hilang. Bagi generasi masa lalu yang merindui "*oud Batavia*" masih sempat bernostalgia bila menyukuri jalan arah ke utara, jurusan kota.

Di antara deretan pertokoan, nampak Gedung Arsip Nasional yang dibangun tahun 1760, oleh Reinier de Klerk.

Lebih ke utara sejumlah bangunan tua masih terpelihara sebagai khasanah sejarah. Bekas *Staad Huis* alias Balai Kota di zaman kolonial Belanda itu kini menjadi Museum Sejarah Jakarta, masih tegak menjulang lengkap dengan koleksi mebel peninggalan VOC, dibangun tahun 1707.

Di seberangnya ada Balai Seni Rupa dan Museum Keramik, bekas gedung *Raad van Justitie* yang dibangun antara tahun 1866-1870. Gedung kuno lain di sekitarnya adalah Museum Wayang, yang terhimpit diantara deretan bangunan yang memadati jalan Pintu Besar Utara.

Bangunan-bangunan tua di ibukota lebih nampak murung daripada bangga sebagai jejak sejarah yang tinggi nilai historisnya. Museum Bahari yang bersosok apa adanya nampak kurang perhatian pemeliharannya.

Kawasan Sunda Kelapa, tempat

Museum Bahari ini berdiri, nyaris kehilangan nuansa kesejarahannya. Satu-satunya bangunan yang mendukung keberadaan Sunda Kelapa (dulu) sebagai bandar terpenting adalah Menara Syahbandar yang kini masih menjulang.

Sulit rasanya membangun imajinasi bahwa Sunda Kelapa tempo doeloe merupakan pusat berlabuhnya kapal-kapal dagang dari penjuru nusantara. Kapal dari Palembang, Tanjungpura, Madura, Makasar, bahkan Malaka, India dan Cina Selatan berdatangan mengangkut rempah-rempah untuk dijual di negerinya.

Sungai Ciliwung yang menjadi urat nadi transportasi masa itu telah kehilangan pamor sejarahnya. Hitam dan berbau, sementara Jembatan Kayu Kota Intan, sia-sia menyajikan panorama kuno yang menggambarkan kesibukan kota bandar.

Kesibukan kawasan Sunda Kelapa kini dipadati kaum pekerja, hilir mudiknya angkutan kota, sederet toko dan pasar tradisional. Kebaharian nenek moyang kita terpendam oleh pola kehidupan di darat yang lebih diminati.

Nelayan, sampai kapan cinta lautmu bertahan? Kita sedang membenahi kehidupan. Arung Samudra dalam rangka Peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka, menyadarkan semangat kebaharian bangsa Indonesia. Berjejak kepada sejarah serta kondisi demografi, cinta kita kepada laut harus dibangkitkan.

Dari titik berangkat itu tak mustahil Sunda Kelapa "dihidupkan" kembali sebagai bandar besar dengan segala prasarana yang modern. Pemerintah DKI Jakarta telah merencanakan membangun "kota tua" dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan ini.

Kawasan Batavia lama ini menurut Gubernur DKI Surjadi Soedirdja merupakan *asset* nasional yang sarat dengan nilai sosial budaya, nilai ekonomi dan sebagai awal berkembangnya kota Jakarta.

Dari sisi bisnis bangunan-bangunan tua itu dapat dijadikan hotel, tanpa merubah bentuk aslinya. Para turis asing gemar berkunjung ke kota-kota yang banyak peninggalan sejarahnya.

Niat Pemerintah DKI Jakarta untuk memfungsikan kembali bangunan tua yang ada pantas disambut dengan gembira. Sebuah bangunan kuno, mungkin saja dimanfaatkan untuk toko cinderamata atau restoran bermenu makanan tradisional Betawi.

> Membangun Kota Tua semoga tidak sekedar menyusun memori sejarah, tapi terpenting disertai ide-ide yang meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekitarnya.

Lebih jauh dapat diharapkan Kali Ciliwung berfungsi kembali dilayari perahu-perahu kecil, sementara Jembatan Kota Intan dilalui sado Bang Sabeni.

Mimpi ini bisa kita teruskan dengan membangun kembali pelabuhan Sunda Kelapa yang modern tanpa kehilangan sentuhan sejarahnya.

Membangun kembali Kota Tua bukan berarti membangun sebentuk nostalgia belaka.

Jika cuma itu tujuan kita, kita terjebak ke jaring-jaring sentimentil, menagung-agungkan sejarah yang *notabene* benuansa kolonial. Hal ini tak akan terjadi bila ide membangun Kota Tua dimuati juga maksud meningkatkan pendapatan rakyat di sekitar kawasan itu.

Kaum nelayan boleh bermimpi memperoleh tempat lelangan ikan yang modern dan terjamin kebersihannya. Sunda Kelapa menjadi bandar yang terbesar se-Asia Tenggara.

Para turis asing memadati bangunan-bangunan tua yang menjual cinderamata atau menikmati soto kaki Betawi hingga dompetnya kempis, sementara anak negeri tertawa menghitung laba.

Jika warga kota mimpi, Pemerintah yang mewujudkan impiannya. Rakyat kecil di Kota Tua memimpikan kemakmurannya, Pemerintah yang mewujudkannya. Maka membangun Kota Tua seyogyanya direncanakan sedemikian rupa sehingga menguntungkan rakyat setempat, sehingga menjadi warga yang lebih makmur.

Dengan kemakmuran yang dicapai kelak mereka akan menjadi "tuan rumah" yang ramah, kaya dan tidak lusuh di hadapan wisatawan asing.

Membangun kembali Kota Tua semoga tidak sekedar menyusun memori sejarah, lebih dari itu disertai ide-ide yang meningkatkan potensi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian kita membangun kota sekaligus memberdayakan masyarakatnya.

EKUIN

BETERNAK ITIK DI KAWASAN PANTAI

DI JAKARTA kok, masih ada peternak itik? Bukankah Jakarta sudah langka orang mengolah sawah, dan apa lagi beternak itik dan bebek, ya ? Begitu celoteh kebanyakan orang. Tetapi, apabila kita berjalan-jalan masuk keluar kampung di Jakarta terutama di daerah pinggiran khususnya di sekitar pantai utara Kota Jakarta, di Kepulauan Seribu, umpamanya, di sana masih dapat dijumpai warga masyarakat yang melakukan kegiatan sebagai peternak itik.

Jadi, ternyata beternak bebek atau itik masih dapat diandalkan untuk mendapatkan nilai tambah. Tak kecuali bagi warga di daerah pinggiran utara Kota Jakarta atau masyarakat nelayan, usaha beternak itik sangat membantu keluarga di rumah dalam penyediaan gizi, protein hewani dan sekaligus sebagai tambahan penghasilan, di samping hasil lautnya.

Kegiatan beternak ini dilakukan terutama pada musim angin barat, di mana nelayan terhenti usaha melautnya karena ombak yang sangat besar, dan ini bisa terjadi lebih kurang selama tiga bulan. Sedangkan dengan beternak itik tetap akan berlangsung memproduksi pangan (telur dan daging) bagi kebutuhan keluarganya dan juga menambah penghasilan secara kontinyu.

Bentuk kandang itik (ranch) yang baik, sederhana, murah dan kuat, cukup memberikan perlindungan terhadap ternak itik.

Begitu pula fasilitas pakan dan pemeliharaan beternak itik, banyak diperoleh kemudahan dalam penyediaan pangan yang bergizi yaitu, makanan ternak yang berasal dari tepung ikan sangat mudah dicari dengan harga relatif murah, dan masih banyak tempat pengembalaan ternak atau angon dari empang atau kali yang bermuara ke laut, bahkan masih terdapat ikan-ikan kecil yang dapat dimakan oleh bebek. Sehingga beternak bebek banyak diminati masyarakat yang berlokasi di dekat pantai. Kemudahan lainnya mudah dipelihara dan tidak mudah terserang penyakit atau wabah, serta modalnya relatif kecil.

Peternak itik di pantai utara Jakarta banyak ditemui di daerah Cilincing, Kapuk Muara, Kamal Muara, Marunda, Sukapura dan Kepulauan Seribu, dan populasinya mencapai lebih kurang 30.000 ekor dewasa dengan jumlah peternak 17 sampai 25 orang.

Pada umumnya peternaknya sebagai penghasil telur konsumsi saja, dan bebek yang sudah kurang produksinya lebih kurang 30% akan dijual sebagai bebek potong. Peternak belum ada yang berusaha di bidang penetasan itik, yang menjual anak itik di pasaran seperti di daerah Tegal, Mojosari dan sebagainya (*breeder*).

Dalam memperoleh bibit, peternak membeli itik dara atau siap bertelur pada usia empat atau lima bulan dengan harga lebih kurang Rp.5.000,- sampai Rp.6000,- per ekornya, yang di dapat dari pemasok anak bebek dari daerah Karawang atau Cilamaya bahkan daerah Tegal-Jawa Tengah.

Ada pula peternak yang

menukarkan bebek tuanya dengan bebek muda atau sedang produksi dengan sistem tukar tambah. Ternak bebek yang dipelihara maupun yang memproduksi telur rata-rata berkisar 60 sampai 80% dan dipelihara selama satu setengah tahun, serta bebek yang tua dijual di pasaran laku Rp. 3.000,- per Kg atau Rp.5.000,- per ekor.

Pakan bebek terdiri dari dedak bekatul dicampur dengan nasi kering dan ditambah konsentrat, atau tepung ikan, bekicot dan sebagainya. Sehingga pakan bebek mengandung protein hewani yang cukup. Ada pula peternak memberikan itiknya dengan roti tawar dari *swipping* pabrik roti yang harganya murah. Sehingga bebeknya lebih sehat dan cukup gemuk, sebaliknya bila tidak diberikan pakan cukup maka bebek tidak mau bertelur.

Kandang bebek dibuat secara sederhana, yaitu sistem *ranch*, dengan pagar pembatas keliling dari bambu setinggi 60 cm atap kandang bebek ditutup dengan rumbai atau gedek bambu asalkan bebek tidak kepanasan atau kehujanan saja.

Di halaman pelataran bermain disediakan tempat pemberian makanan dan minuman dalam baskom yang diberikan dua kali sehari, pagi dan sore.

Pemeliharaannya sangat mudah dengan cara dikurung di *ranch* atau diangon di sawah-sawah, juga di sungai kecil agar bebek dapat bermain dan berenang serta mencari makanan tambahan. Yang perlu dikhawatirkan oleh peternak adalah bila diangon di sawah, yang sawahnya habis disemprot dengan obat insektisida atau racun tikus, maka dapat menimbulkan kematian pada itik atau bebek.

Areal peternakan itik yang memanfaatkan lahan dan kolam di sekitar rumah tinggal (atas). Pemberian makanan itik yang berkualitas akan memberikan kontribusi produksi telor yang meningkat. (bawah)

Pemasaran hasilnya sangat mudah dan peternak belum pernah menjual telur ke pasar, bahkan pedagang telur mencari telur di peternak, karena yakin telur yang didapat adalah telur-telur baru. Harga jual telur per butir rata-rata Rp.250,- sedangkan harga pembelian pakan dan pemeliharaan rata-rata Rp.50,- per ekor, bahkan kadang-kadang lebih. Karenanya harga dedak kadang-kadang naik drastis terutama bila musim hujan, namun masih dapat keuntungan meskipun sedikit.

Bagi masyarakat yang memiliki lahan pekarangan cukup di daerah pinggiran kota kiranya peternak bebek dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat, tanpa menganggu kebersihan lingkungan.

(DJoko Leksono)

KONTAK BISNIS PENGUSAHA AYAM POTONG DI JAKARTA

SUATU terobosan lagi, mempertemukan para pengusaha ayam potong, baik pemasok ternak dari luar daerah maupun grosir penerima ayam potong, khususnya ayam ras di Jakarta. Penyelenggaraan kontak bisnis ini oleh Dinas Peternakan DKI Jakarta, pada tanggal 10 Oktober lalu di Gedung Tenis, Jl. Gunung Sahari Raya No 11 Jakarta Pusat.

Acara ini berjalan lancar sehari penuh. Dihadiri Aisten Sekwilda bidang Adbang Ir. H. Prawoto S. Danumihardjo, para pejabat dari Dinas Peternakan Dati I Propinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Dati II Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan undangan lainnya. Pertemuan dimaksudkan agar dapat mengantisipasi dan menstabilkan pasokan ayam ras bagi kebutuhan masyarakat Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jakarta merupakan daerah pasar besar bagi ternak ayam ras maupun daging ayam yang dipasok dari luar Jakarta, terutama dari daerah penyangga ternak ayam Jakarta, antara lain Tangerang, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Cianjur/Jawa Barat bahkan dipasok pula dari Magelang Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menyoroti tentang konsumsi daging, maka secara umum urutan tingkat konsumsi daging berdasarkan jenis ternak di Jakarta adalah sebagai berikut, daging unggas 51,3%, daging sapi/kerbau 35,54%, daging babi 10,9%, daging kambing/domba 2,26%.

Ayam potong khususnya ayam broiler dicanangkan pemerintah sebagai subtitusi daging sapi/kerbau yang populasinya cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1992 yang lalu kebutuhan masyarakat baru mencapai 45%, namun pada tahun 1995 ini meningkat hingga 51,3% dan kondisi ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan penduduk yang juga meningkat. Karena laju pertumbuhan penduduk maupun diversifikasi pengolahan bahan pangan yang memerlukan bahan baku daging ayam meningkat.

Meningkatkanya kebutuhan ayam potong ini perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana berupa tempat penampungan ayam dan tempat pemotongan (TPA) yang memadai serta tata niaga ayam potong yang lebih baik.

Menurut kajian Dinas Peternakan DKI Jakarta konsumsi daging tahun 1994 mencapai 13,22 Kg per kapita per tahun. Dari konsumsi tersebut 6,78 Kg atau 51,3% diantaranya berasal dari daging ayam atau setara dengan sembilan ekor ayam per kapita per tahun.

Drh. Soemitro, Kep. Dinas Peternakan DKI Jakarta memberikan ucapan selamat pada peserta.

Dengan penduduk Jakarta di siang hari 10 juta jiwa, maka diperlukan 90 juta ekor ayam per tahun dan konsumsi daging ayam diproyeksikan akan meningkat 10 persen tiap tahun. Sehingga tahun 1995 memerlukan 100 juta ekor ayam.

Untuk menjamin kelancaran penyediaan ayam potong di Jakarta ini perlu dilaksanakan langkah-langkah perbaikan tata niaga ayam potong, khususnya pada tingkat pemasok yang berhubungan langsung dengan para peternak produsen dengan para penampung, grosir dan distributor yang mendistribusikan ayam potong ke para pemotong (TPA) di semua wi-

Pemotongan ayam modern dipacu untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. (atas). Para undangan dan team perumus aktif mengikuti jalannya sidang. (bawah)

layah kotamadya yang berorientasi pada kemitraan usaha.

Pada hakikatnya di Jakarta tata niaga ayam potong dikenal tiga jalur yaitu, pertama dari produsen langsung ke RPA dan dipasarkan di Jakarta dalam bentuk karkas/ daging ayam, langsung ke pasar swalayan,, hotel dan sebagainya, dan biasanya pada peternak skala besar.

Kedua, dari produsen langsung ke pengusaha penampung/grosir ayam, selanjutnya para penampung ayam menjual ayamnya ke TPA dan pengecer kecil di pasar konvensional. Ketiga, dari produsen melalui pedagang pemasok, mengirim ayam kepada para grosir ayam atau langsung ke pemotong ayam di TPA pasar konvensional.

Menurut Asisten Adbang, Ir. Prawoto, bahwa Jakarta tidak mungkin dapat dikembangkan budi daya peternakan dan pertanian secara besar-besaran, karena terbatasnya lahan. Namun sebagai daerah pemasaran yang konsisten terhadap pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang bersifat pasca produksi. Disamping akan mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang sering timbul dari usaha peternakan.

Daging Ayam yang Sehat

Kesadaran gizi masyarakat meningkat, yang berdampak meningkatnya pola makan dari bahan pangan yang bersumber dari protein hewani. Pada tahun 1994/ 1995 masyarakat Jakarta mengkonsumsi daging dari berbagai jenis sebanyak 170.168.017 kg atau 466 ton per hari. Dari sejumlah tersebut dicukupi dari unggas 60%, yaitu ayam ras 260.000 ekor per hari, ayam buras 75.000 ekor per hari dan itik 5.000 ekor per hari.

Pada kesempatan lain Kepala Dinas Peternakan DKI Jakarta, Drs. Soemitro mengatakan, pertumbuhan perunggasan di Jakarta sangat cepat. Namun agak terlambat dalam mengantisipasi dan pengaturannya, sedangkan peraturan yang baru dilaksanakan adalah Perda No. 5/1992 tentang Perunggasan di DKI Jakarta. Selain itu Jakarta merupakan daerah kesatuan ekonomi yang tidak bisa berdiri sendiri, maka diperlukan konsep dan kesatuan tindak secara integral dengan daerah sekitarnya (Bogor-Tangerang-Bekasi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung) khususnya dalam menyediakan kebutuhan masyarakat akan daging ayam yang sehat, berkualitas dan murah.

Sesuai dengan motto Jakarta *service city*, perlu adanya penyajian daging ayam yang baik, sehat, berkualitas dan halal. Serta diperlukan penataan tata niaga ayam potong yang lebih baik dan transparan.

(Djoko Leksono)

PAMERAN HORTI '95

Dibuka 1-10 Desember. Aneka tanaman langka dan unggul, seperti buah, sayur, tanaman hias, anggrek, Toga (Tanaman Obat Keluarga) digelar. Juga sarana, iptek cara menanam, pupuk, obat tanaman, sampai ke pengolahan paska panen di demonstrasikan.

PRODUK Hortikultura kian dibutuhkan. Kian maju masyarakat, kian meningkatlah permintaan terhadap variasi jenis, kuantitas dan kualitas produk hortikultura.

Karena itu, Jakarta sebagai kota megapolitan perlu berperan sebagai pusat pasar komoditi horti dalam dan luar negeri.

Guna mewujudkan itu, Dinas Pertanian Jakarta jauh hari telah berusaha menggalang kemitraan dengan aneka asosiasi pertanian di DKI dan sekitarnya dalam upaya meningkatkan kuantitas, kualitas dan jenis produk horti guna memenuhi kebutuhan mendatang.

Untuk itu perlu media, yang bisa memacu para petani Jakarta berusaha lebih maju sesuai era globalisasi ekonomi yang kini berhembus kian deras.

Pameran Horti '95 adalah media yang tepat untuk itu.

Maka belum lama ini. Ir. HM. Maharanto, Kepala Dinas Pertanian DKI Jakarta mengundang para wartawan Ibukota untuk memberikan penjelasan tentang Pameran Hortikultura yang diadakan 1-10 Desember 1995 di Bumi Perkemahan Pramuka Ragunan, Jl. Harsono RM, Jaksel.

Dijelaskan, Pameran itu bertujuan pertama, ikut memeriahkan HUT RI ke 50 dan HUT ke 46 kota Jakarta. Kedua, meningkatkan promosi dan informasi potensi produk horti Indonesia dan DKI khususnya. Tujuan ketiga ialah meningkatkan kemandirian dan profesionalisme petani agribisnis khususnya, agar mampu bertarung di pasar bebas.

Pameran itu bertema, "Kembangkan Hortikultura untuk Meningkatkan Pendapatan Petani dan Kesejahteraan Masyarakat".

Menyertai Pameran diadakan pula bursa, lomba, sarasehan dan peragaan.

Yang dipamerkan meliputi sayuran, tanaman buahan, tanaman hias, tanaman obat keluarga (Toga) dan buahan Indonesia. Selain itu dipamerkan juga iptek berkait pertanian dan bibit aneka jenis hortikultura.

Untuk itu disediakan stand Iptek, stand produksi dan stand Propinsi 3 x 3 m tanpa dinding. Sedang stand lingkungan seluas 3 x 6 m. Selama 10 hari itu tiap stand disediakan pula lampu penerangan 20 watt dan air. Bagi para pemamer tak dipungut biaya.

Pada bursa terjadi jual beli aneka jenis produk, sarana dan bibit hortikultura. Di sini bertemu penjual dan pembeli. Para peminat dapat membeli aneka bibit unggul, pupuk, sarana teknik, termasuk obat untuk tanaman.

Stand Bursa ini menurut Ma-

haranto disediakan 3 x 3 m tanpa didnding dengan sewa Rp. 250.000 selama 10 hari. Tentang Lomba meliputi lomba pasca panen olahan nangka, tanaman buah dalam pot (jeruk), sayuran pot (tomat dan cabe rawit), tanaman hias dalam pot (kuping gajah) tanaman obat keluarga (Toga), buah unggul, merangkai bunga dan penganekaan makanan dari singkong.

Selain itu diselenggarakan juga pendukung, seperti lomba lukis Flora bagi anak SD dan lomba lintas alam Wisata Agro.

Selain itu ada acara lain lagi, yaitu tour ke objek wisata agro.

Acara pameran Horti ini dilangsungkan tiap tahun. Maksudnya agar tiap perkembangan baru atau penemuan bibit unggul baru atau proses baru pengolahan paska panen, bisa ditampilkan untuk diikuti para petani atau pelaku agribisnis di Ibukota, maupun dari daerah se Indonesia, termasuk para peminat dari negara jiran.

Karena Jakarta berlahan terbatas untuk pertanian, maka Dinas Pertanian DKI mengekspos Mode "Pertanian Kota." Melalui teknologi maju, tanah yang terbatas bisa menghasilkan pendapatan berlipat ganda bagi para petaninya.

Bagi masyarakat awam, mengunjungi pameran horti ini akan menambah wawasan baru. Mereka bisa bertani jeruk, sayur atau cabe atau tomat dalam pot dengan hasil yang mengagumkan.

Selain itu bagi mereka yang pekarangannya agak luas, bisa membeli jenis bibir buah unggul seperrti rambutan Rofia yang harga 4 atau 5 kali lipat dari harga rambutan biasa.

Aneka bibit unggul seperti bibit sayuran, buah penyakit tanaman, bahkan cara mengolah produk paska panen menjadi buah kalengan atau slei, dapat disaksikan, dipelajari di ini, hingga dapat dipraktekkan di rumah.

(HUHB)

PACHIRA AQUATICA

Berasa dari Amerika Latin (Mexico, Venezuela, Costa Rica). Pada tahun 1931 dibudidayakan di TAwian. Pada mulanya sebagai tanaman bebuahan. Biji buahnya bila digoreng dapat dimakan sebagao kacang-kacangan. Dikneal dengan naman "Kacang Malabar" atau "Kacang Amerika".

Lambat laun dijadikan tanaman hias dengan cara mengayam beberapa pohon menjadi satu sehingga bentuknya indah sekali. Sangat diminati di seluruh dunia. Selain sebagai tanaman hias, juga ditanam di halaman sebagai tanaman peneduh.

Mengapa orang menyukai tanaman ini ? Di Amerika akarnya digunakan sebagai bahan pembuat kertas. Karena kertasnya kuat sekalli dan tidak mudah rusak./ lusuh maka digunakan untuk uang kertas. Dengan demikian orang sangat menghargai tanaman ini dan dianggap sebagai Pohon Pembawa Keberuntuntungan (Hoki), terutama bila daunnya lebih dari lima lembar atau disebut juga pohon uang (Money Tree).

Khasiatnya sama seperti ikan Arwana. Bedanya lebih murah dan lebih mudah perawatannya. Dibiarkan saja akan tumbuh sendiri. Jika digunakan sebagai tanaman hias dalam rumah hanya perlu pemberian air satu gelas dua kali dalam seminggu. Dalam waktu 3-6 bulan dikeluarkan 1-2 hari supaya kena matahari dan diberi pupuk tanaman. Boleh mengguntingkan (trimming) daunnya sesuai dengan selera supaya kelihatan artisitik.

TANAH & PEMUKIMAN

Magang Manajemen PERUMAHAN PERKOTAAN

Oleh H. Sumitro Maskun

Pengantar Redaksi:

Artikel ini diangkat dari pidato pengarahan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada acara "Magang Manajemen Perumahan Perkotaan" yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Dalam pengarahan ini, penulis menyajikan materi yang penting bagi aparat Pemda terkait. Semoga artikel ini menjadi suatu yang berdaya guna bagi pembaca. Terima kasih. Red.

PENYELENGGARAAN kegiatan magang Manajemen perumahan perkotaan ini saya anggap penting dan strategis guna meningkatkan peranan pemerintah kota dalam mengisi program BKS-AKSI maupun dalam memenuhi pembangunan khususnya perumahan.

Dalam uraian berikut akan saya jelaskan serba sedikit tentang fungsi dan peranan pemerintah kota dalam bidang perumahan dan pemukiman.

Secara filosofis pemerintah kota dibentuk untuk mengayomi warga kotanya, karenanya, wajarlah kalau warga kota menaruh kepercayaan dan harapan besar ke jajaran birokrasi pemerintahan untuk memenuhi harapan mereka.

Kita sudah menyadari sepenuhnya kini di kota telah terjadi pertumbuhan perekonomian yang pesat, perkembangan teknologi, pendidikan tinggi, pusat-pusat hiburan dan fasilitas sosial lainnya yang kesemuanya ini merupakan daya tarik bagi penduduk desa untuk datang ke kota.

> Secara filosofis pemerintah kota dibentuk untuk mengayomi warga kotanya.
> Maka, wajarlah kalau warga kota menaruh kepercayaan dan harapan besar ke jajaran birokrasi pemerintahan untuk memenuhi harapan mereka.

Beberapa ahli mengatakan pertumbuhan perkotaan telah mencapai 4%-5% per tahun sehingga diperkirakan akhir Pelita VI nanti 40% atau sekitar 70 juta penduduk Indonesia berada diperkotaan.

Berbagai masalah timbul akibat pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, antara lain munculnya daerah kumuh di perkotaan, meningkatnya tekanan terhadap lahan perkotaan umum untuk tempat pemukiman baru.

Dalam hal demikian itu tentunya pemerintah kota dituntut mengendalikan dan mengatur kebutuhan akan perumahan bagi penduduk.

Pemenuhan kebutuhan tersebut harus bergerak ke arah yang menguntungkan dan sekaligus mengurangi semaksimal mungkin akibat negatif akibat pertumbuhan kebutuhan akan perumahan.

Kita ketahui secara umum, pemerintahan kota harus dapat memberikan 3 (tiga) kelompok pelayanan yaitu:

- Public Service Functions,
- Development Functions,
- Protective function,

Dalam prakteknya pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan tersebut tidak semuanya menjadi beban pemerintah kota. Beberapa bagian dari fungsi tersebut pada dasarnya menjadi tugas instansi vertikal departemen maupun non departemen yang mempunyai wilayah kerja di kota tersebut.

Akibat keadaan ini, adalah menjadi tugas pemerintah kota

Pembangunan perumahan dan Pemukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat

untuk menangani hal tersebut secara profesional guna terwujudnya pemukiman tertib dan sesuai peruntukan wilayah kota.

Kegiatan magang manajemen perumahan perkotaan yang dilaksanakan BKS-AKSI pada hari ini paling tidak sudah menggugah dan menyadarkan kita akan fungsi strategis pemerintah kota dalam masalah perumahan.

Kita sangat menyadari masalah perumahan tidaklah semata-mata menjadi urusan pemerintah kota. Masalah kebijaksanaan perumahan secara nasional pada prinsipnya menjadi bidang garapan menteri negara urusan perumahan.

Sedangkan perumahan sekitarnya dilakukan 3 (tiga) pihak yakni:

- Perum Perumnas.
- Para developer perumahan
- Dan Masyarakat itu sendiri.

Pemerintah kota hendaknya bersikap aktif dan responsif agar semua rumah yang dihasilkan ketiga komponen tersebut dapat mengatasi permasalah yang timbul di bidang perumahan.

Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa informasi tentang usaha yang telah ditempuh Depdagri untuk menangani masalah perumahan khususnya di perkotaan yang meliputi masalah kelembagaan, fungsi dan peranan pemerintah kota dalam bidang pemukiman dan perumahan.

Dari segi kelembagaan diinformasikan bahwa telah ada peraturan pemerintah nomor 14/1987 tentang penyerahan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum ke daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Mendagri nomor 80/1994 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas lingkup pekerjaan umum di daerah.

Di daerah TK. II urusan cipta karya dimungkinkan dapat dibentuknya Dinas Perumahan.

Untuk pola maximal Dinas Perumahan di daerah Tk. II ini terdiri 5 (lima) seksi, 20 Sub Seksi dan 1 Subag dengan 3 (tiga) urusan.

Sedang yang pola minimal terdiri dari 3 (tiga) seksi, 9 Sub seksi dan 1 (satu) Subag dengan 3 (tiga) urusan. Persyaratan minimal harus ada personil, keuangan dan kantor/peralatan yang mencukupi.

Kini daerah Tk. I yang telah mempunyai Dinas Perumahan baru pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah propinsi daerah Tk. I Sumatera Utara. Sedang Daerah Tk. II baru Kotamadya daerah Tk. II Malang dan Kotamadya Daerah Tk. II Solo.

Agar pemahaman kita mengenai fungsi dan peranan pemerintah kota dalam masalah perumahan dan pemukiman ini menjadi bulat dan didasarkan atas persepsi yang sama, maka ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan dan permukiman.

Dalam hubungan ini, GBHN (menurut Tap MPR RI No. II/MPR/1993) telah menetapkan kebijaksanaan pokok di bidang perumahan dan permukiman

sebagai berikut:

A. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat guna membentuk lingkungan dan persamaan nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga.

Pembangunan permukiman, baik pembangunan perumahan baru maupun pemugaran perumahan di pedesaan dan diperkotaan, bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dalam lingkungan yang sehat, aman, damai, tentram, dan sejahtera.

B. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu lebih ditingkatkan dan diperluas hingga dapat makin merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam hal ini rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya haruslah diperhatikan.

Pembangunan perumahan dan permukiman harus dapat mendorong kegiatan pembangunannya dengan memperhatikan prinsip swadaya, gotong-royong, dan meningkatkan pembangunan sektor lain.

Penyuluhan tehnis tentang pembangunan dan pemugaran perumahan perlu dilanjutkan dan diperluas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan rumah susun di kota-kota besar perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya.

C. Koperasi, usaha negara, dan usaha swasta yang melayani pembiayaan pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah besar.

Perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan perseorangan antara lain dengan penyediaan kredit, pengaturan persewaan dan hipotek perumahan.

Peran serta aktif masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan ini perlu didorong.

D. Pembangunan perumahan dan permukiman harus mampu memperluas kesempatan usaha, lapangan kerja dan mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan.

Bahan tersebut hendaknya terbuat dari bahan dalam negeri dengan mengutamakan penggunaan bahan setempat.

Pemanfaatan sumber daya alam, pengolahan bahan, penyuluhan tehnis dan pemasarannya perlu disempurnakan dan makin dikembangkan.

Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan permukiman perlu ditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.

E. Penciptaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, sehat, dan aman.

Hal ini perlu terus ditingkatkan antara lain melalui pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih, fasilitas sosial dan ibadah, fasilitas ekonomi, transfortasi, rekreasi, fasilitas olahraga, serta prasarana lingkungan.

Fasilitas penanganan limbah disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat di pedesaan maupun perkotaan agar semakin banyak rakyat mendiami rumah sehat dalam lingkungan perumahan yang sehat pula.

Fungsi dan peranan pemerintah kota dalam bidang pemukiman dan perumahan dapat dijelaskan sbb:

A. Kebijaksanaan pembangunan perumahan sederhana, prasarana dan fasilitas lingkungan.

Mengusahakan agar pembangunan perumahan sederhana dapat direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dan menjadi bagian integral dari pembangunan wilayah. Ini dapat mendorong terbukanya lapangan kerja dan kemanfaatan lain bagi masyarakat di lokasi yang bersangkutan. Penanganan tersebut juga ditujukan sebagai usaha meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga di daerah maupun unsur terkait lainnya.

Dalam hubungan itu diusahakan penyusunan peraturan daerah, disamping itu dapat berjalan dengan lancar dan tertib, dimaksudkan pula agar setelah selesainya pembangunan dapat dilakukan penyerahan prasarana lingkungan ke pemerintah daerah dengan baik.

Untuk program perbaikan kampung dan pemugaran perumahan desa, ikut serta mengembangkan lembaga pelaku pembangunan perumahan dan pemukiman (developer), LMD. LSM, dan lembaga gotong-royong masyarakat lainnya.

Pembangunan itu sejauh mungkin hendaknya sesuai aspirasi masyarakat, menjadi suatu proses pemobilisasian potensi dan sumber daya masyarakat seoptimal mungkin.

Pembinaan terus-menerus perlu agar usaha perintisan dapat mencapai tujuannya sebagai penggerak maupun perangsang untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

Hal itu bisa didukung dengan penyediaan informasi tentang segala potensi yang ada seperti sumberdaya tenaga kerja, sumber bahan baku dan komponen bangunan, air bersih, pranata sosial ekonomi masyarakat.

Dalam hubungan ini, pembangunan prasarana dan fasilitas lingkungan tersebut didorong agar semakin lama semakin dapat diusahakan oleh dana masyarakat sendiri, baik secara gotong-royong maupun melalui pengusahaan yang profesional.

Guna meningkatkan fungsi prasarana dan fasilitas yang telah dibangun masyarakat perlu dibina agar bisa mandiri melakukan pemeliharaan dan pengelolaan, termasuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

B. Program Penataan Ruang

Perencanaan tata ruang agar mengarahkan pada berfungsinya kawasan permukiman secara optimal dan mendukung pertumbuhan wilayah.

Penanganan tersebut dilakukan melalui pembinaan aparat perencanaan penataan ruang di daerah serta membantu pemerintah daerah menyusun rencana penataan ruang kota/daerah, disertai perumusan peraturan perundang-undangan mengenai rencana penataan ruang.

C. Program Pertanahan

Lembaga pertanahan di daerah perlu dibantu dalam melaksanakan perijinan pencadangan dan pengadaan tanah, serta membina kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran peraturan daerah untuk menunjang kebijaksanaan pertanahan bersama instansi terkait.

E. Kebijaksaan Kelembagaan

Kemampuan lembaga di lingkungan daerah perlu ditingkatkan khususnya mengenai kemampuan tehnis dan manajemen, dan yang mampu mengkoordinasikan penanganan pembangunan perumahan dan permukiman.

Selain itu mendorong dan menggerakkan lembaga swadaya masyarakat dan badan usaha swasta untuk pembangunan perumahan termasuk pengadaan dan distribusi bahan komponen bangunan.

Selanjutnya membina dan mengembangkan sistem kelembagaan perumahan di daerah.

F. Kebijaksaan Pengembangan SDM

Mengusahakan agar pembangunan perumahan sederhana dan pembangunan fasilitas lingkungan yang dilakukan secara informal dan bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah diselenggarakan dengan melibatkan peran masyarakat sedemikian rupa.

Usaha ini merupakan upaya pengembangan SDM untuk pembangunan pada umumnya.

Penanganannya diarahkan agar dapat dilakukan dalam struktur pranata sosial yang ada, baik yang tumbuh oleh dorongan pemerintah maupun yang bersifat nasional.

G. Program peraturan perundang-undangan

Memberi masukan dalam upaya menyusun peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman terutama yang menyangkut bidang persyaratan administratif.

H. Program penelitian dan pengembangan

Membina dan mengembangkan program kegiatan penelitian dan pengembangan perumahan dan permukiman yang terkait. **(HUHB)**

PKK DKI JAKARTA TAK PERNAH TERTINGGAL ALUR WAKTU

Sepuluh Program PKK dapat didiskusikan secara rasional dan obyektif, dengan dilandasi nurani yang bersih dalam memahami hakikat masalah kehidupan masyarakat. Terutama kelompok masyarakat miskin, tertinggal dan masih belum beruntung, baik yang bermukim di wilayah kumuh perkotaan maupun di kelurahan tertinggal.

Ketua TP PKK DKI, Ibu Sumarsih Surjadi Soedirdja didampingi Penasehat/ Ketua TP PKK Jakarta Timur, Soedarsono memeriksa kipas hasil kerajinan salah satu stand peserta Lomba 10 Program PKK, Jakarta Timur baru-baru ini.

MEMASUKI zaman globalisasi, pun peranan wanita semakin global, sejalan dengan putaran roda pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Presiden bahwa gerakan PKK ditetapkan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keluarga.

Semangat ibu-ibu PKK terlihat dalam karya-karyanya. Mereka menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kesejahteraan masyarakat tanpa pamrih.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta agar peranan kaum wanita terus ditingkatkan, baik pengetahuan maupun keterampilan. Dituangkan melalui rapat konsultasi (Rakon) PKK tingkat DKI Jakarta yang berlangsung selama dua hari di Balaikota baru-baru ini.

Rakon PKK ini diikuti sebanyak 210 orang yang terdiri dari 39 orang anggota TP-PKK DKI, 35 orang anggota TP-PKK Kotamadya Kepala Kantor Bangdes Kotamadya, 45 orang narasumber dari instansi terkait tingkat DKI Jakarta.

Harapan Gubernur Surjadi Soedirdja, ketika memberikan pengarahan, mengatakan masalah yang berkenaan dengan 10 program PKK dapat didiskusikan secara rasional dan objektif dengan dilandasi nurani yang besih dalam memahami masyarakat. Terutama kelompok masyarakat miskin, tertinggal dan masih belum beruntung, baik yang bermukim di wilayah kumuh perkotaan maupun di kelurahan tertinggal.

Program pemerintah yang sedang digalakkan perlu penanganan yang serius yaitu menyukseskan IDT. Tentunya program tersebut tak akan langsung ke bawah. Dalam tahun anggaran 1994/1995 telah dilaksanakan pelatihan IDT bagi 91 orang Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan IDT/ Ingub.

Tahun anggaran 1995/1996 ini akan dilatih pula 36 orang anggota Pokja II TP-PKK Kelurahan IDT dan Ingub sebagai pendamping di kelurahan masing-masing.

Banyak sudah karya dalam sumbangsihnya kepada negara, yang baru-baru ini TP-PKK telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera pada bulan Januari-Februari 1995.

PemenangKeluarga Sejahtera foto bersama dengan piala, saat acara Raker BKKBN DKI di Rumah Pola aru-baru ini.

Hasil pendataan keluarga tersebut memberikan gambaran bahwa, masih terdapat sejumlah 345.476 KK (27,64%) dari jumlah keluarga yang ada di DKI Jakarta, masih berada pada tahap pra-sejahtera dan sejahtera I.

Mereka termasuk keluarga yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial psikologisnya. Dari data tersebut menunjukkan 41,9% disebabkan karena kesulitan ekonomi. Dari sejumlah 191.078 KK yang bermukim di kelurahan IDT dan Ingub, sejumlah 69.841 KK (36,65) adalah keluarga yang masih berada dalam tahap prasejahtera dan sejahtera I.

Tanggal 20 Mei 1995 yang lalu, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1995 telah dilaksanakan pencanganan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dan Pengunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Bapak Presiden. Dalam hal ini DKI Jakarta dijadikan sebagai proyek percontohan.

Gubernur Surjadi Soedirdja mengharapkan PKK sebagai gerakan pembangunan yang tumbuh dari masyarakat juga aktifnya dalam menyukseskan GDN. TP-PKK dapat memberikan penyuluhan, bimbingan dan contoh nyata kepada masyarakat luas, terutama melalui kelompok-kelompok yang dimiliki oleh PKK yaitu PKK RT/RW DKI Jakarta memprogramkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat pada umumnya. Seperti Lomba 10 Program PKK yang pelaksanaan-nya dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kotamadya dan tingkat provinsi DKI Jakarta.

Tujuannya untuk meningkatkan pemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan gerak PKK di DKI Jakarta. Dan secara khusus kegiatan ini melibatkan anak-anak remaja serta pemuda melalui lomba nyanyi tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, serta Lomba Vocal Group Remaja dan Pemuda se-DKI Jakarta dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-468 dan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-50.

Satu lagi kegiatan yang cukup besar yaitu direncanakan pencangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) pada bulan September dan Oktober 1995 oleh Bapak Presiden. Kegiatan PIN ini memberikan imunisasi polio kepada semua balita yang ada di seluruh Indonesia.

TP-PKK DKI Jakarta dalam peran sertanya telah melaksanakan persiapan-persiapan penyuluhan terhadap TP-PKK Kotamadya maupun TP-PKK Kecamatan dalam upaya menunjang suksesnya PIN di DKI Jkarta.

Bertitik tolak dari Tema Rakon PKK Tahun 1995 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga, Ketua Umum PKK Pusat, Ny. E. Yogie SM. mengatakan, berangkat dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah tempat asal sumber daya manusia, maka sudah sepantasnya kelembagaan keluarga diperkuat atau ditingkatkan kualitasnya, serta dibina kemandirian dan ketahanannya, agar terbentuk keluarga yang sejahtera sesuai dengan tujuan PKK.

"Manusia Indonesia yang berkualitas hanya akan lahir dari remaja yang berkualitas akan tumbuh dari anak-anak yang berkualitas. Karenanya, meningkatkan kualitas anak-anak sungguh merupakan syarat penting dari era tinggal landas menjelang akhir abad ke-20 ini. Menuju terwujudnya masyarakat Pancasila yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan.

(In)

PERHUBUNGAN

RAKERNIS TRANSFORTASI

Masalah angkutan di DKI Jakarta membutuhkan penanganan khusus. Rakernas diharapkan bisa memberikan pemecahan masalah angkutan secara tepat, hingga jasa angkutan di DKI Jakarta kian memuaskan masyarakat.

Sekjen Dephub. Muctarudin Siregar didampingi Kakanwil Dephub DKI, Abdul Karim dan Karo Binekda usai pembukaan Rakernis Bid. Transfortasi DKI.

MASALAH transfortasi kian kompleks. Kemacetan terus berlanjut. Situasi perlu diatasi. Maka suatu Rakernis (Rapat Kerja Teknis) bidang transfortasi dibuka Gubernur Soedirdja di Balaikota Jakarta, 23 November 1995.

Tujuan rakernis Kanwil Dephub Prop DKI Jakarta itu untuk mengevaluasi pelaksanaan hasil rakernis tahun sebelumnya dan upaya meningkatkan pelayanan jasa transfortasi tahun esok.

Diharapkan aneka masalah dapat ditemukan. Untuk seterusnya dihimpun, dibahas, dirumuskan bersama hingga tercapai suatu pemecahan yang tepat. Dengan begitu diharapkan, pelayanan jasa transfortasi seterusnya kian dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Dalam kata sambutannya, Gubernur Surjadi menegaskan perlunya pemantapan Sistem Angkutan Terpadu untuk bisa melahirkan pelayanan angkutan yang andal di DKI Jakarta.

"Materi bahasan Rakernis yang luas sasarannya ini akan memerlukan pengkajian yang mendalam," kata Gubernur.

Karena itu para peserta Rakernis diharapkan mampu memanfaatkan waktu dengan cermat sehingga sasaranbisa dicapai sebaik-baiknya.

Sasaran yang hendak dibahas Rakernis ini menyangkut upaya meningkatkan pelayanan jasa angkutan yang handal tapi terjangkau oleh masyarakat.

Upaya mencari sistem angkutan yang handal ini merupakan suatu keharusan mengingat tantangan yang dihadapi kini semakin berat dan kompleks.

Dilihat kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara, Pusat Pemerintahan maupun dari berbagai aspek kehidupan, penataan masalah angkutan kota Jakarta memerlukan penanganan khusus.

Dengan serba permasalahan yang berkembang setiap saat di DKI ini mendorong perlunya menangani masalah angkutan lebih serius.

Pembangunan Jakarta juga mempunyai bobot tersendiri sesuai perannya sebagai Ibukota Negara.

Sebagai serambi terdepan Indonesia, DKI harus mampu menjadikan Kota ini sebagai milik dan kebanggaan rakyat Indonesia.

Untuk itu, Ibukota yang bersih, indah, hijau, nyaman dan representatif pantas menjadi acuan bagi siapapun yang mengaku memiliki

kota ini.

Perkembangan Jakarta, dengan kelengkapan infrastruktur kotanya, harus mampu mengilhami pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Dengan kata lain, bobot pembangunan kota Jakarta, harus membuahkan dampak positif dan gaungnya dirasakan sebagai harapan yang menjanjikan, bagi segenap warga kotanya.

Pembangunan kota Jakarta, mempunyai keterkaitan kompleks karena keberadaan Jakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Botabek dan Propinsi Jawa Barat.

Bahkan pembangunan Jakarta juga harus dikaitkan pertumbuhan kota-kota besar lain di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Perlu dicatat, kemajuan pembangunan kota yang tidak seimbang, dapat berdampak terjadinya arus urbanisasi dari kota-kota lain ke Jakarta.

Dengan demikian, pembangunan kota Jakarta harus dipikirkan keterpaduannya, sehingga mempunyai keterkaitan integratif, terutama di kawasan Botabek.

Sesuai Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah DKI Jakarta 1996/1997 maka sasaran dan kebijaksanaan pembangunan di wilayah Pemda DKI Jakarta tetap berpedoman ke Repelita VI DKI Jakarta.

Sasaran tersebut diarahkan ke terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Maka , kesinambungan dan keterkaitan antara rencana jangka panjang dengan rencana pembangunan jangka menengah serta rencana pembangunan jangka pendek akan selalu diupayakan.

Untuk terselengaranya pembangunan tersebut dibutuhkan sistem, dan mekanisme perencanaan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sistem tersebut diharapkan mampu memadukan dan menyelaraskan aneka kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Karena laju pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta meningkat cukup tinggi terutama sektor jasa (±11,5%), terjadilah pergeseran posisi "*leading Sector*" tak lagi dipegang industri tapi diambil alih oleh yang akhirnya menuju ke "*Service City*". Guna mewujudkan Jakarta sebagai "*Service City*" berbagai sarana dan prasarana pembangunan terus di tingkatkan sesuai perkembangangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Khusus berkait pembangunan sarana dan prasarana transfortasi, diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.

Pembangunan berbagai sarana dan prasarana transfortasi tersebut meliputi *fly over, under pass, inner* dan *autter ringroad, ATCS,* rambu-rambu lalu lintas lainnya, sistem pengatur manajemen transfortasi seperti *tree in one* dan sistem arus satu arah.

Semuanya ini untuk memperlancar lalu lintas di wialayah DKI.

Sementara itu telah dicanangkan pula berbagai program pembangunan strategis lain seperti rekalmasi pantai utara (*water front city*), *harbour road, subway* yang memerlukan penanganan terkoordinasi.

Meski berbagai upaya telah dilaksanakan, namun perlu disadari semua itu belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian berkembang.

Dari berbagai masukan dari masyarakat di lapangan, pelayanan masyarakat termasuk pelayanan jasa tranportasi masih belum sempurna.

Kemacetan lalu lintas di ruas-ruas jalan protokol maupun penumpang masih sering terjadi. Pengaturan lalu lintas di terminal bus belum teratur.

Kendaraan tidak laik jalan cukup banyak ditemukan di jalanan. Pengaturan trayek angkutan sering tumpang tindih.

Terlebih disiplin para pengemudi dan pemakai jalan lainnya masih memprihatinkan.

Sementara itu tingkat pelayanan jasa di sub sektor laut dan udarapun masih ditemukan aneka kendala yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Berbagai kendala dan kekurangan itu perlu ditangani secara konsepsional dan terkoordinasi agar dimasa datang sudah dapat dieliminir.

Melalui forum Rakernis Surjadi mengharapkan berbagai kendala dapat dipecahkan. Peluang yang mungkin agar dimanfaatkan.

Pembahasan tuntas dapat menghasilkan keputusan atau rumusan yang tepat guna mengantisipasi kebutuhan di masa datang.

Gubernur yakin dengan keikhlasan, kesungguhan dan keyakinan peserta Rakernis, sasaran Insya Allah dapat terwujud.

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai himbauan dan harapan saya, semoga penyelenggaraan Rakernis ini dapat berjalan.

Rakernis diharapkan bisa menghasilkan masukan berharga bagi semua pihak guna menyukseskan pembangunan di DKI umumnya dan sektor pelayanan transfortasi khususnya.

(HUHB)

LINGKUNGAN

HUTAN BETON DAN PENURUNAN TANAH

Penyebab Banjir di Jakarta

JAKARTA, agaknya masih akan tetap menjadi pelanggan banjir. Yang menjadi pnyebab masih adanya ancaman banjir di ibukota tadi, bukan hanya karena tingginya curah hujan dan adanya luapan 13 sungai yang melintas di Jakarta. Melainkan juga adanya penurunan permukaan tanah di daratan, serta seringnya terjadi pasang laut di perairan Teluk Jakarta.

Berbagai upaya penanggulangan memang telah dan akan terus dilakukan. Diantaranya melalui Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai (PIPWS) Ciliwung-Cisadane yang antara mengelola sejumlah pompa, waduk, dan pintu air di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Disamping itu, proyek tersebut juga telah menormalisasi beberapa sungai seperti Kali Grogol, Cideng, Thamrin, Banjir Kanal dan Kali Sunter.

Namun menurut Prof. Dr. Sutikno dari Fakultas Geografi UGM, di depan peserta seminar tentang bencana alam di Indonesia (28/9), untuk mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta tidak cukup hanya dengan sitem drainase. "Sebab semakin luasnya wilayah genangan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang adalah terjadinya peristiwa amblesan atau penurunan permukaan tanah," ungkap Sutikno.

Pola Penggunaan Lahan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta, ada sekitar 300 titik jalan di ibukota yang mengalami penurunan bahkan hingga mencapai 60 cm di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Hal itu terjadi selain karena penggunaan air tanah yang berlebihan, juga akibat pembangunan gedung-gedung bertingkat yang semakin pesat dan padat.

Karenanya, bila dalam mengatasi banjir hanya terkonsentrasi pada sistem darinase/penyaluran air yang ada, maka masalah banjir di DKI Jakarta tidak pernah akan terselesaikan. Ditekankan, untuk mengurangi beban banjir di Jakarta tidak bisa hanya mengadalkan drainase yang ada. Harus ada pengaturan pengambilan air tanah, pembuatan sumur resapan terutama di daerah hulu, dan pembuatan drainase yang memadai.

Dan untuk jangka panjang, pengaturan pola penggunaan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat diperlukan untuk mengurangi bahaya banjir di daerah hilir, tandas Sutikno. Tapi apa yang terjadi kini, banyak lahan DAS yang justru menjadi rusak kerena ulah manusia. Hal ini terbukti dengan adanya bantaran sungai

yang dimanfaatkan orang lain untuk hunian liar, sehingga merusak badan tanggul dan alur sungai.

Sebagai bukti adalah Kali Ciliwung, sungai yang besar sepanjang 72 Km yang bagian tengah dan hilirnya membelah kota Jakarta itu lebarnya ada yang kurang dari 15 meter. Kedalaman sungai-sungai yang ada di Jakarta termasuk Kali Ciliwung juga

Normalisasi kali sebagai upaya menghindarkan banjir pada beberapa lokasil

semakin berkurang. Penyebabnya, selain faktor erosi juga banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang ke selokan atau sungai.

Pesatnya pembangunan fisik, baik di Jakarta maupun di wilayah Bogor-Tangerang-Bekasi (Botabek), juga mampu memperbesar kemungkinan terjadinya banjir di Jakarta. Hal ini terjadi karena daerah curah hujan yang semula menjadi kawasan resapan, serta situ-situ yang tadinya menjadi daerah "parkir liar", semakin menyempit. Banyak yang berubah fungsi menjadi tempat permukiman dan lain sebagainya, ungkap Ir. Siswoko Dipl. HE, dari PIPWS Ciliwung-Cisadane kepada Med*ia Jaya.*

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974, situ atau danau kecil merupakan daerah yang berada dibawah kekuasaaan negara, sehingga keberadaannya harus dilestarikan. Namun dari hasil studi yang dilakukan Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum terhadap sekitar 300 situ yang terdapat di Jabar yang mana

Genangan air/banjir dimanfaatkan anak-anak untuk berenang

situ diantaranya terdapat di Botabek, diketahui bahwa sebagian besar situ-situ yang ada di kawasan itu tadi, kini kondisinya rusak parah.

Semakin pesatnya perkembangan areal permukiman dan pertanian, luas situ-situ tadi terus menyusut. Akibat lainnya adalah kemungkinan terjadinya intrusi air laut di ibukota akan terus meluas, bahkan lenyapnya situ akibat pengurugan juga bisa menyebabkan banjir. Karena air hujan yang tadinya secara alamiah ditampung di situ-situ tidak lagi mempunyai tempat penampungan.

Menurut studi tersebut, selain akibat perkembangan permukiman dan pertanian, menyusutnya area situ di Botabek juga terjadi akibat banyaknya *gulma* dan pendangkalan endapan yang masuk secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi semua itu terjadi karena ulah manusia di sekitarnya. Bahkan menurut Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, penyerobatan areal situ sering terjadi akibat ketidakjelasan batas antara situ dan tanah milik penduduk.

Dari 176 situ di Botabek tadi, 122 situ diantaranya terdapat di daerah Bogor, Tangerang 45 situ, dan 12 lainnya terdapat di Bekasi. Di daerah Bogor, situ-situ yang sudah lenyap antara lain situ Cijantung Hilir, situ Jenggot, situ Cipayung, situ Ciranji, situ Kecil, situ Jampang Bulu, situ Gunung Nyungsung, dan situ Rumpin. Sedangkan situ Kemang yang dulunya seluas 50 Ha, kini hanya tersisa 5 Ha.

Di Tangerang, situ terbesar adalah Patrasena dengan luas 360 Ha, tetapi kini sembilan puluh persennya sudah menjadi sawah. Sementra 10 Ha luas situ Rompong, empat diantaranya sudah berubah menjadi perumahan. Dan situ Peamulang, meski kondisinya masih baik, luasnya berkurang dari 31 Ha menjadi 28 Ha. Untuk Bekasi, dari setengahnya telah berubah fungsi baik sebagai areal permukiman maupun industri serta lapangan golf.

Di DKI Jakarta, nasib situnya pun tak banyak berbeda dengan situ-situ yang terdapat di Botabek. Karenanya, Dirjen Pengairan

Sungai di Jakarta menerima beban yang semakin berat.

Departemen Pekerjaan Umum dalam kesempatan dengar pendapat dengan Komsisi V DPR RI tahun lalu meminta agar Pemerintah DKI Jakarta bisa menjelaskan, mengapa situ dan rawa yang sejak dulu ada di wilayah DKI Jakarta, kini dibiarkan atau bahkan diizinkan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Karena dengan lenyapnya situ dan rawa, yang fungsinya sebagai areal "parkir air" selama ini telah sebagian besar wilayah Jakarta terkena banjir.

Dalam sistem pengembangan wilayah sungai, daerah *retarding basin* merupakan tempat penampungan air alamiah yang bisa menampung air bila terjadi luapan air sungai. Baik akibat curah hujan maupun pasang air laut. Tetapi di Jakarta, situ-situ yang tadinya banyak terdapat di daerah selatan kini praktis tidak ada lagi, karena diurug oleh para developer untuk kepentingan usaha mereka.

Hutan Beton

Kini musim hujan 1995/1996 sudah mulai tampak, ancaman banjir tahun ini diperkirakan akan semakin meluas. Sebab, selain secara geografis sekitar 40% luas wilayah Jakarta merupakan daerah rendah atau sama tinggi dengan permukaan laut, kian maraknya pertumbuhan "hutan beton" yang menyebabkan menyusustnya lahan-lahan terbuka yang tadinya bisa menyerap air hujan juga bisa memperluas titik rawan genangan.

Antara tahun 1988-1992, Pusat Data (Pusdata) Departemen Pekerjaan Umum melakukan survai keadaan permukaan tanah di DKI Jakarta. Hasilnya diketahui, rata-rata setiap tahun luas lahan terbuka yang sudah berubah fungsinya menjadi "hutan beton" sekitar 2.612 hektar. Padahal lahan-lahan terbuka yang semula berfungsi sebagai penyerap air hujan yang jatuh di atasnya. Sehingga tidak sempat mengalir ke sungai yang akhirnya meluap dan menimbulkan genangan.

Hasil survai tersebut juga mengungkapkan bahwa lahan-lahan terbuka yang berubah fungsi tadi semula berupa lahan-lahan pertanian serta lahan yang terdiri dari tanaman rimbun (*high densty vegetation*) dan lahan kosong. Tapi kini, sebagian besar dari lahan terbuka tadi sudah berubah menjadi areal permukiman, kawasan industri, jalan-jalan dan lain sebagainya.

Selama empat tahun terakhir ini seluruh lahan yang berubah fungsi tadi telah mencapai 10.491 hektar. Diperkirakan, kecenderungan meluasnya hutan beton yang menyebabkan air hujan terus mengalir dipermukaan, masih akan terus berlangsung seiring dengan pesatnya pembangunan fisik di ibukota. Sementara saluran drainase yang ada belum terbebas dari timbunan sampah yang dibuang oleh warga ibukota, serta masih banyaknya pemukim liar di bantaran-bantaran sungai serta waduk (Pluit), dikhawatirkan luas wilayah genangan akan semakin bertambah meski jumlah titik rawan banjirnya berkurang.

Menurut perhitungan Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, pada musim hujan tahun 1995/1996 ini, di seluruh DKI Jakarta terdapat sekitar 80 titik rawan banjir yang perlu diwaspadai. Maka untuk itu, sejak awal Oktober ini Proyek Induk PWS Ciliwung-Cisadane sudah bersiap dan membentuk Pos Komando (Posko), bersama Dinas PU DKI Jakarta, seluruh aparat pengendali banjir yang tersebar di waduk-waduk dan stasiun-stasiun pompa yang ada, kini mereka telah bersiaga penuh selama 24 jam. Sehingga kemungkinan terjadinya banjir bisa dipantau sejak dini, dan masyarakat bila terjadi banjir dan terpaksa mengungsi karena rumah mereka tergenang air.

(Pap)